

**Manajemen Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Strategi
Pengelolaan Pertanian Padi di Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat Guna Mendukung Program Swasembada
Pangan Nasional: Sinergi Dengan Kodim 0609/Cimahi**

Riska Utami Kuswana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad
Yani, Cimahi, Indonesia
Email: riska1055@gmail.com

Patrick Arya Bima

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad
Yani, Cimahi, Indonesia
Email: tr3cks.ab@gmail.com

Nur Fitria Salsabila Hartono

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad
Yani, Cimahi, Indonesia
Email: nurfitriasalsabila33@gmail.com

Neneng Widya Amelia

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad
Yani, Cimahi, Indonesia
Email: nenengwidyaamelia@gmail.com

Received: June 9, 2025, Revised: August 15, 2025, Approved: December
31, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of collaboration between local government, private sector, farmer groups, and the Indonesian Army (KODIM 0609/Cimahi) in the development of rice commodities in Lembang Subdistrict, West Bandung Regency. The research used a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and policy documentation. Results show the local government acts as a facilitator and coordinator. Collaboration involves government, farmer groups, agricultural extension officers, private sector, and KODIM Cimahi as a mover, mentor, and unifier, particularly in supporting the intensification and extensification of rice fields. Key success factors include inter-actor trust, communication, policy and budget support, and the commitment of the Indonesian Army through TMMD and Binter programs targeting rice farming infrastructure. Obstacles include cross-sector coordination, conversion of agricultural land, and suboptimal collaboration evaluation. Recommendations include strengthening collaborative forums by structurally involving KODIM, co-funding schemes to maintain productive land, enhancing extension officer capacity in synergy with Babinsa, and results-based monitoring specifically for food security.

Keywords: government management, agricultural collaboration, Indonesian Army, Cimahi Military Command.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, kelompok tani, dan KODIM 0609/Cimahi dalam pengembangan komoditas padi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kebijakan. Hasil menunjukkan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Kolaborasi melibatkan pemerintah, kelompok tani, penyuluh, swasta, dan KODIM Cimahi sebagai penggerak, pendamping, dan pemersatu, khususnya dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sawah. Faktor kunci keberhasilan adalah kepercayaan antaraktor, komunikasi, dukungan kebijakan dan anggaran, serta komitmen TNI AD dalam program TMMD dan Binter yang menyasar infrastruktur pendukung padi. Kendala meliputi koordinasi lintas sektor, alih fungsi lahan sawah, dan evaluasi kolaborasi yang belum optimal. Rekomendasi mencakup penguatan forum kolaborasi dengan melibatkan KODIM secara struktural, skema pendanaan bersama untuk menjaga lahan produktif, peningkatan kapasitas penyuluh bersama Babinsa, dan monitoring berbasis hasil khusus untuk ketahanan pangan.

Kata Kunci: manajemen pemerintahan, kolaborasi pertanian, TNI AD, KODIM Cimahi.

PENDAHULUAN

Ketersediaan pangan global saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim *El Nino* dan *La Nina*, konflik geopolitik, serta kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain menjadi faktor utama yang menyebabkan turunnya ketersediaan pangan dunia. Ketersediaan pangan masa depan di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk diatasi. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030-2040, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk yang sangat besar. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 297 juta, hal ini menyebabkan Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada pembangunan industri dan pemukiman sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya produksi padi karena menyebabkan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya sejalan dengan dinamika perintah Presiden Republik

Indonesia ditargetkan Indonesia mampu mencapai Swasembada Pangan di tahun 2025 yaitu mampu menyiapkan ketersediaan untuk kebutuhan pangan pokok khususnya padi, memiliki cadangan pangan untuk antisipasi keadaan darurat dan mampu mengekspor beras untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Di satu sisi Kementerian Pertanian RI sebelumnya sudah merencanakan program pencapaian swasembada pangan selama 4 (empat)

tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Dihadapkan dengan perintah dari Presiden RI untuk dapat mencapai Swasembada Pangan di tahun 2025 maka dibutuhkan akselerasi yang komprehensif dan integral dari seluruh komponen bangsa. Sehingga Kementerian Pertanian RI memandang perlu adanya pendampingan TNI AD dalam proses menuju pencapaian Swasembada Pangan tersebut di tahun 2025. Peningkatan produksi padi diharapkan dapat menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan pangan nasional dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan produksi padi dapat dicapai dengan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi yang berkelanjutan dan efisien.

Dalam rangka pengawalan dan pendampingan swasembada pangan diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak salah satunya dengan TNI khususnya TNI AD. Secara struktural TNI AD memiliki gelar satuan komando kewilayahan (Satkowil) tersebar di seluruh Indonesia yaitu Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), dan Komando Distrik Militer (Kodim). Gelar kekuatan Satkowil tersebut tersebar di seluruh Provinsi sampai dengan Kabupaten. Kodam III/Sw memiliki gelar kekuatan Satkowil yang bertanggung jawab pada wilayah teritorial Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk di dalamnya KODIM 0609/Cimahi yang memiliki tanggung jawab wilayah teritorial meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dimana Kecamatan Lembang adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Sektor pertanian, khususnya komoditas padi, memiliki peran strategis bagi ketahanan pangan di Kecamatan Lembang. Meskipun dikenal dengan

kawasan agrowisata dan hortikultura, Lembang masih memiliki hamparan sawah yang perlu dijaga kelestarian dan produktivitasnya. Kompleksitas masalah yang dihadapi, seperti tekanan alih fungsi lahan, fluktuasi harga, dan kebutuhan irigasi yang handal, menuntut kolaborasi multi-aktor antara pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh, swasta (penyedia *input* dan *offtaker*), dan institusi strategis seperti TNI AD dalam hal ini KODIM memiliki tanggung jawab wilayah teritorial dan program pembinaan teritorial (Binter) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menganalisis manajemen kolaborasi tersebut dengan menitikberatkan pada sinergi antara otoritas sipil dan kemiliteran dalam pengembangan pertanian padi.

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada manajemen kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan pertanian padi di Kecamatan Lembang, khususnya sinergi dengan Kodim 0609/Cimahi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan wilayah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah strategi yang diterapkan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kecamatan Lembang serta kontribusinya terhadap swasembada pangan nasional, khususnya pada komoditas padi. Permasalahan lainnya berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan guna mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan pertanian sebagai bagian dari pencapaian swasembada pangan wilayah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI Angkatan Darat, serta pemangku kepentingan terkait dalam sektor pangan. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji peran dan efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bersama TNI AD, khususnya Kodim 0609/Cimahi, dalam mendukung pencapaian swasembada pangan wilayah pada komoditas padi, serta menganalisis kontribusi masyarakat dan pihak swasta, terutama kelompok tani, dalam kolaborasi tersebut. Adapun

manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan melalui integrasi berbagai teori pemerintahan dan ketahanan pangan, sekaligus memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah dan TNI AD, serta menjadi rujukan atau studi perbandingan bagi instansi lain dalam merancang dan melaksanakan program kolaboratif di bidang pangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen pemerintahan daerah dipahami sebagai proses pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Terry dalam konteks manajemen). Pemerintahan, menurut C.F. Strong, memiliki kewenangan fundamental dalam menjaga keamanan, membuat regulasi, dan mengelola keuangan negara guna menyelenggarakan kepentingan publik. Dalam konteks desentralisasi, manajemen pemerintahan daerah tidak lagi berorientasi pada kepatuhan administratif semata, melainkan pada *result-oriented governance* yang menekankan hasil, partisipasi, transparansi, dan kolaborasi (Dwiyanto, 2005). Pemerintah daerah berperan strategis dalam pembentukan regulasi, perumusan kebijakan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik yang berkualitas (Anugerah, 2012), dengan fungsi utama sebagai penyedia layanan publik, pemberdaya masyarakat, dan regulator. Pelaksanaan fungsi tersebut harus berada dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab dan dijalankan oleh aparatur profesional serta akuntabel (Ibnu Redjo, 2018), guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sandiasa & Agustana, 2018).

Konsep *collaborative governance* berkembang sebagai respons atas keterbatasan model pemerintahan hierarkis dan birokratis. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan di mana pemerintah secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses

pengambilan keputusan publik yang formal dan berbasis konsensus. Pendekatan ini menuntut perubahan struktur organisasi menuju pola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja (Sedarmayanti, 2012), serta mendorong kerja sama lintas wilayah dan lintas aktor untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik (Sandiasa, 2016). Smith (1985) menekankan pentingnya kolaborasi dalam konteks otonomi daerah, terutama terkait pengembangan ekonomi, manajemen sumber daya, egalitarianisme, dan profesionalisme pemerintahan. Namun, praktik tata kelola kolaboratif juga menghadapi tantangan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Larsson dan Sjöqvist (2022) di Swedia yang menemukan bahwa kolaborasi tanpa kejelasan mandat dan kepemimpinan berisiko hanya menciptakan ilusi kesiapan ketahanan pangan.

Dalam konteks ketahanan pangan, kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting seiring meningkatnya krisis pangan global dan masuknya isu ketahanan pangan dalam agenda Sustainable Development Goals (Lele & Goswami, 2013). Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan, tetapi juga aksesibilitas, stabilitas, dan kualitas pangan, yang hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya (Mujiburrohman, 2021). Di Indonesia, TNI Angkatan Darat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pembinaan teritorial (Binter) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004, yang dijalankan secara berjenjang hingga tingkat Kodim (Indriastuti et al., 2023). Susilowati (2021) menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan pangan daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendukung, dan petani dalam kerangka *multi-stakeholder agricultural collaboration*. Dalam sistem desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014), kolaborasi menjadi strategi utama untuk mengatasi keterbatasan kapasitas daerah, memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan kebijakan pangan berbasis lokal, melibatkan aktor non-pemerintah, serta mengoptimalkan peran penyuluhan dan Babinsa (Susilowati, 2021). Peran

TNI AD dalam pembangunan semakin diperkuat melalui Perkasad No. 2 Tahun 2021 tentang Pembinaan Teritorial, yang menempatkan Babinsa sebagai garda terdepan dalam membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat dan mendukung stabilitas serta kesejahteraan masyarakat (Susanto & Suharnoko, 2023; Turnip, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif informan (Arikunto, 2006). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait kolaborasi dalam pengembangan pertanian padi. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun & Effendi, 1995). Informan dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan mereka terhadap program swasembada pangan, meliputi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, penyuluh pertanian lapangan, ketua kelompok tani padi, perwakilan koperasi atau pengepul padi, perangkat desa, serta unsur TNI melalui Danramil dan Babinsa. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Namun, karena keterbatasan akses wawancara tatap muka, penelitian ini lebih menekankan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan sumber sekunder yang relevan (Arikunto, 2006; Singarimbun & Effendi, 1995).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Kerangka teori penelitian dibangun dari kondisi empiris Kecamatan Lembang yang menghadapi tantangan alih fungsi lahan, keterbatasan irigasi, dan fragmentasi kebijakan, sehingga memerlukan model manajemen kolaborasi

lintas sektor. Kerangka konseptual ini disintesis dari Teori Manajemen Pemerintahan Daerah yang menekankan efektivitas tata kelola dan koordinasi antarinstansi (Dwiyanto, 2005), Teori Collaborative Governance yang menyoroti pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan fasilitatif dalam pengambilan keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008), Teori Kolaborasi Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menekankan integrasi kebijakan dan partisipasi petani (Susilowati, 2021), serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembinaan Teritorial sebagai dasar normatif peran TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen kolaborasi Pemerintah.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial di era globalisasi ini. Salah satu pilar penting untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah swasembada pangan. Lebih dari sekadar kemampuan memproduksi makanan sendiri, swasembada pangan mencerminkan kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangannya tanpa bergantung secara signifikan pada impor. Kondisi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, teknologi pertanian, kebijakan pemerintah, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mencapai swasembada pangan bukan hanya tentang kuantitas produksi, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan Masyarakat (Subari, 2025). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama dalam Asta Cita. Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa amanat konstitusi harus diwujudkan dengan menghadirkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan. Bagi Prabowo, kedua hal ini merupakan fondasi kesejahteraan bangsa sekaligus syarat mutlak untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Presiden

menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan meningkatkan produksi beras dan jagung, memperluas lahan pertanian, hingga menyesuaikan harga gabah agar petani lebih sejahtera. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Pemerintah mengalokasikan perhatian besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dana jumbo dipersiapkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rancangan tersebut, alokasi Rp53,3 triliun diperuntukkan bagi lumbung dan cadangan pangan, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton. Selain itu, Bulog diperkuat perannya dengan anggaran Rp22,7 triliun agar dapat menjaga stok pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Prabowo memandang bahwa kebijakan besar tidak akan berjalan efektif jika regulasi masih berbelit. Karena itu, sejak awal 2025 pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Hasilnya terlihat nyata. Produksi beras meningkat, stok di gudang pemerintah melonjak hingga lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan harga tetap stabil. Kondisi ini memberi harapan besar bagi petani, sekaligus menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Langkah selanjutnya adalah mempercepat pencetakan lahan baru dan penyediaan fasilitas pertanian modern. Pemerintah menjamin harga pembelian gabah agar petani tetap untung, sekaligus menyiapkan pembiayaan murah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha taninya. Dengan kebijakan ini, kedaulatan pangan yang menjadi impian lama bangsa Indonesia kini semakin dekat untuk diwujudkan. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan juga terlihat melalui pembentukan tim khusus. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai ketua tim percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penugasan ini didasarkan pada Keputusan

Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dengan tujuan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga lebih terarah. Tugas tim ini tidak kecil karena harus mengoordinasikan 27 kementerian dan lembaga agar bergerak dalam satu visi yang sama (Baderi, 2025).

TNI AD menyambut baik program swasembada pangan dari pemerintah. Sebagai bagian integral dari komponen utama pertahanan, TNI AD memandang Krisis pangan global yang disebabkan oleh konflik geopolitik, disrupti rantai pasok, perubahan iklim ekstrem, dan pandemi telah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan isu keamanan nasional. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi besar, tidak hanya harus menjamin kecukupan pangan dalam negeri, tetapi juga mengamankan cadangan logistik strategis nasional untuk menghadapi situasi darurat. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI AD melalui pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter) telah aktif mendukung program ketahanan pangan, khususnya program swasembada padi dan pertanian terpadu di tingkat kabupaten, desa dan kelompok tani. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara menegaskan bahwa sumber daya alam seperti lahan dan air serta sumber daya manusia seperti petani dan aparat kewilayahan dapat didayagunakan untuk mendukung pertahanan negara. Dengan landasan tersebut, kolaborasi TNI AD dengan Kementerian/Lembaga (Kementan, PTPN, BULOG, BGN dan Pemda) menjadi kunci dalam mengakselerasi program swasembada padi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, searah dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih 2024–2029 menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Cita ke-3 menekankan

kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis desa dan wilayah, sementara Cita ke-6 menekankan penguatan ketahanan nasional dan pertahanan negara. Kedua cita tersebut memberikan mandat langsung kepada TNI AD untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem ketahanan pangan wilayah. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu Kementerian Pertanian (Kementan) bersama TNI AD sepakat untuk menjalankan langkah-langkah strategis guna mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Mentan Amran menyampaikan bahwa percepatan swasembada pangan membutuhkan penguatan sinergi antara Kementan, TNI AD, Kementerian PU, dan lembaga terkait lainnya. Ia menekankan bahwa TNI AD tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga terlibat langsung dalam pengawalan program peningkatan produksi padi di lapangan (Pertanian, 2024).

Pemerintah pusat dalam hal ini dikoordinir oleh Kemenko Pangan mendorong kolaborasi berbagai elemen kelembagaan negara untuk bersama-sama mendukung program swasembada pangan sebagai tanggung jawab bersama. "Kita harus awasi bersama-sama, tidak mungkin pemerintah pusat saja, begitupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, karena yang mencakup swasembada pangan seluruh pemangku kebijakan terkait" (Panggabean, 2025). Sejalan dengan hal tersebut Kementerian dalam negeri juga gayung bersambut dalam dukungannya dalam program pemerintah swasembada pangan. Terkait hal itu dalam kesempatan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024, Mendagri pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung agar target swasembada pangan bisa tercapai. "Swasembada pangan. Jadi kita-kita pemerintah daerah tolong didukung. Ini leadingnya adalah Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri Koordinasi Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian

kemudian Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan saya mohon dengan kepala daerah dampingi, paling tidak Kepala Dinas Pertanian Pangan ini hadir dan sampai enggak hadir," (KBRprime, 2024)

Dengan melihat uraian di atas secara garis besar sudah dapat kita lihat bersama, bahwa Kementerian/Lembaga terkait mendukung secara totalitas kebijakan pemerintah dalam pencapaian Swasembada Pangan. Hal ini memang tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan kolaborasi yang utuh, integral, holistik dan komprehensif. Kementerian Pertanian RI terlihat sebagai leading sektor mengusung beberapa program strategis pertanian dengan mengandeng Kementerian / lembaga lain. Hal yang menarik dan yang akan menjadi sorotan adalah Kementerian RI sebenarnya sudah memiliki Renstra dalam rangka pencapaian Swasembada Pangan sampai dengan tahun 2029, namun Renstra tersebut ternyata harus diakselerasi karena sesuai perintah presiden RI, Swasembada Pangan harus tercapai di tahun 2025. Dengan demikian Kementerian RI mengajak berbagai pihak terkait untuk berkolaborasi termasuk salah satunya dengan TNI AD agar akselerasi tersebut dapat dilaksanakan dan target tercapai. Mulai dari tahun 2024 tercatat Kementerian RI telah melaksanakan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tidak tertinggal juga kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan karena rencana strategis yang sudah disusun tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan pemerintah daerah. Karena pada dasarnya di tingkat daerah merupakan eksekutor yang menentukan keberhasilan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Dengan demikian TNI AD yang memiliki garis komando tegak lurus sampai dengan tingkat desa (Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa) dapat berkolaborasi dengan baik dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada (Provinsi- Kabupaten-Kecamatan-Kelurahan-Desa) dalam rangka bersinergi dengan program Kementerian RI yang secara tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Distan Provinsi-Distan Kabupaten-BPP Kecamatan-PPL Desa. Dengan demikian kolaborasi yang terjalin di tingkat pemerintah pusat dengan Kementerian lembaga, diharapkan dilanjutkan ditingkat

daerah. TNI AD sampai dengan tingkat Koramil-Babinsa berfungsi sebagai katalis, pendamping dan pengawal sehingga kolaborasi dan kegiatan strategis bidang pertanian untuk swasembada pangan antara unsur Kementerian / lembaga di daerah dengan unsur pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dimana salah satu wilayahnya yaitu kecamatan lembang adalah bagian struktural pemerintahan. Dalam tugas pelayanan publik diharapkan juga dapat berkolaborasi sesuai tataran tingkatan kewenangan dengan instansi/lembaga terkait. Instisuti TNI AD yang memiliki wilayah teritorial yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Lembang adalah Kodim 0609/Cimahi. Swasembada Pangan Padi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, dimana dalam implementasinya berpedoman pada manajemen pemerintahan daerah. Menurut Dwiyanto, manajemen pemerintah daerah tidak sekadar berorientasi pada administrasi formal dan kepatuhan prosedur birokrasi, tetapi menekankan pentingnya manajemen public yang berorientasi pada hasil (result oriented governance), partisipatif, transparan, dan kolaboratif. (Dwiyanto, 2005). Dalam hal Swasembada Pangan Daerah, Pemerintah daerah sKAbumen Bandung Barat dituntut secara aktif dan positif dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah daerah utamanya dalam bidang perekonomian (Anugerah, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kerangka landasan hukum (peraturan daerah). Melalui kebijakan, peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian RI yang memiliki program strategis pertanian yang pada pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh unsur pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat-BPP Kecamatan dan PPL pada tingkat Desa dengan memberdayakan warga masyarakatnya yaitu para petani / kelompok tani. Secara nyata di lapangan dapat dilihat bagaimana

Pemda memiliki peran yang vital dalam mengelola lahan sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, namun tidak berpihak pada ketersedian pangan wilayah dalam hal ini adalah lahan pertanian.

2. Penyusunan kebijakan publik dan rencana Pembangunan daerah jangka menengah. Hal ini diimplementasikan bagaimana kebijakan publik yang mengarah dan mendukung serta berpihak pada terselenggaranya swasembada pangan.
3. Menyediakan pelayanan publik kepada Masyarakat secara cepat, murah, dan bermutu. Hal ini diimplementasikan dengan pelayanan pada pengurusan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) bagi Poktan, sehingga Poktan tersebut resmi dan terdaftar.

Manajemen inilah yang dapat dikolaborasikan dengan Kodim 0609/Cimahi serta stakeholder terkait guna melaksanakan tiga fungsi utama:

- a. Fungsi pelayanan publik (memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur).
- b. Fungsi pemberdayaan masyarakat (mendorong partisipasi dan kemandirian warga dalam pembangunan).
- c. Fungsi pengaturan (regulatory) (membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung tata kelola lokal).

Strategi pencapaian Swasembada Pangan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian Swasembada Pangan merupakan program strategis pusat dalam hal ini Kementerian RI yang dilaksanakan sampai dengan tingkat daerah meliputi tiga kegiatan, yaitu Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Optimasi Lahan (Oplah) Dan Cetak Sawah Rakyat (CSR), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Luas Tambah Tanam (LTT) Padi. Suatu kegiatan memaksimalkan dan mengoptimalkan penanaman padi pada tipe lahan sawah

reguler/sawah irigasi yang sudah ada selama ini dan terdata dalam LBS (Luas Baku Sawah) yang ada di Indonesia. Kegiatan ini adalah bagian dari Intensifikasi Lahan yaitu mengoptimalkan produksi padi dengan tidak menambah luas lahan namun menambah luas tanam dalam arti dalam satu tahun yang awalnya hanya satu kali tanam (IP1) ditingkatkan menjadi dua kali tanam (IP2), yang awalnya dua kali tanam (IP2) ditingkatkan menjadi tiga kali tanam (IP3) serta dengan melihat beberapa pertimbangan wilayah dapat ditingkatkan menjadi empat kali tanam (IP4). LTT padi merupakan bagian dari Intensifikasi Lahan yaitu pengelolaan lahan yang sudah ada (eksisting) untuk meningkatkan produksi padi tanpa menambah luasan lahan. Keterlibatan TNI AD dalam hal ini khususnya Kodim adalah mengerahkan personelnya yaitu Danramil dan Babinsa untuk mendampingi Poktan dalam melaksanakan penanaman padi di wilayah sesuai target luas tambah tanam masing-masing wilayah. Target luas tanam secara nasional yaitu 17 ribu Ha, namun dalam dinamika perjalanan kegiatan mulai Februari 2025, target per wilayah fluktuatif sesuai dengan target kesanggupan wilayah. Pendataan luas tambah tanam dilaksanakan setiap hari melalui laporan PJ (Penanggung Jawab) masing-masing provinsi yaitu personel Kementerian RI (eselon II/III) secara vicon/Daring. Tugas pendampingan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Babinsa bersama PPL mendampingi dengan mendorong Poktan untuk senantiasa menanam padi dalam musim tanam selama satu tahun (2025). Musim tanam masing-masing wilayah bervariasi sesuai kultur tanam di wilayah, rata-rata antara 1 sampai dengan 3 musim tanam. Wilayah yang musim tanam hanya 1 kali tanam dalam satu tahun diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 2 kali tanam, yang 2 kali tanam diupayakan menjadi 3 kali tanam dan dengan kondisi tertentu diupayakan yang 3 kali tanam menjadi 4 kali tanam (hal khusus dengan mempertimbangkan kondisi tanah

dan kearifan lokal tanam setempat serta lingkungan yang mendukung). Dengan demikian Indeks Pertanaman (IP) dapat meningkat.

- b. Babinsa bersama PPL saling berkoordinasi di lapangan sehingga tidak ada lahan sawah yang terlewat untuk ditanami padi. Selalu monitor dan menyisir wilayah masing-masing sehingga diyakinkan seluruhnya dapat ditanam padi dengan maksimal.
 - c. Babinsa berkoordinasi dengan PPL untuk menyamakan data harian luas tanam yang diperoleh untuk dilaporkan secara berjenjang (PPL melaporkan ke BPP Kecamatan dilanjutkan ke Distan Kab/Kota, data Kab/Kota dihimpun oleh PJ Provinsi untuk dilaporkan ke Kementeran, sedangkan Babinsa dilaporkan ke Koramil selanjutnya ke Kodim untuk dimasukkan ke format laporan Google Spreadsheet LTT dari Sterad yang dapat dimonitor oleh Korem dan Kodam sebagai fungsi kontrol).
 - d. Babinsa/Danramil/Dandim ikut membantu mencari solusi kepada PPL, BPP dan Distan Kab/Kota jika di wilayahnya terjadi kendala dalam kegiatan luas tambah tanam terkait kebutuhan Alsintan, Benih, Pupuk, Irigasi (Sarana Produksi), jika diluar kemampuan makan melaporkan ke Korem, Kodam dan Sterad.
2. Optimasi Lahan (Oplah). Optimasi lahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan sawah dengan fokus kegiatan penyiapan lahan dan pembangunan atau rehabilitasi konstruksi yang dapat menata air yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan pertanaman di lahan rawa maupun non rawa. Optimasi Lahan merupakan bagian dari Intensifikasi Lahan yaitu pengelolaan lahan yang sudah ada (eksisting) baik lahan sawah rawa maupun lahan non rawa/kering/tadah hujan, untuk meningkatkan produksi padi tanpa menambah luasan lahan. Target Kementeran untuk Oplah tahun 2025 sebesar 3 juta Ha lahan sawah. Oplah dibagi menjadi 2 yaitu Oplah Lahan Rawa dan Oplah Lahan Non Rawa (Sawah

Kering/Tadah Hujan). Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Kodim yaitu:

- a. Oplah Lahan Rawa. Berdasarkan kesepakatan dengan Kadistan Kab./Kota sebagai PPK, Kodim melaksanakan swakelola tipe 2 untuk melaksanakan pembangunan konstruksi air di lahan sawah sebagai bagian dari tahap olah tanah. Anggaran yang dikelola senilai 4,6 juta rupiah per Ha. Kontrak swakelola tipe 2 yang dilakukan oleh Kodim dengan Distan berdasarkan Survey Investigasi Design (SID) yang dibuat oleh Distan Provinsi bersama dengan akademisi/ perguruan tinggi sesuai rekomendasi dari Kementan. Setelah SID terbit dilanjutkan dengan kontrak swakelola tipe 2 dan pekerjaan lapangan oleh Kodim sebagai tim pelaksana swakelola. Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan antara lain pembuatan tanggul- tanggul pengairan, pintu air, jalan usaha tani, pembersihan/normalisasi irigasi, pembuatan rumah pompa air dan pekerjaan konstruksi lain yang dapat mendukung peningkatan indeks pertanaman di lahan tersebut. Setelah konstruksi selesai maka dilanjutkan kegiatan olah tanam oleh Poktan dengan anggaran 900 ribu rupiah per Ha.
- b. Oplah Lahan Non Rawa. Sesuai dengan Juknis Oplah Non Rawa, Kodim hanya melaksanakan pendampingan seperti yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan LTT Padi Reguler. Pada Oplah Non Rawa dilaksanakan Swakelola tipe 4 yang dikerjakan oleh Poktan. Jika Poktan tidak sanggup atau tidak memiliki kapasitas dalam mengerjakan konstruksi maka pekerjaan dapat dilaksanakan oleh Brigade Pangan yang dibentuk oleh Kementan mulai dari olah lahan sampai dengan olah tanam dengan melibatkan Poktan setempat. Saat ini terdapat 800 orang Babinsa yang ditunjuk sebagai pendamping dalam Brigade Pangan.
3. Cetak Sawah Rakyat (CSR). Merupakan kegiatan Ekstensifikasi Lahan yaitu membuat/mencetak lahan baru yang sebelumnya belum ada menjadi lahan sawah yang siap untuk ditanami sehingga membantu

mendukung peningkatan produksi padi. Dalam hal ini terjadi penambahan lahan sawah yang nantinya akan dimasukkan dalam data LBS (Lahan Baku Sawah) yang diregistrasi. Target dari Kementerian untuk CSR 2025 yaitu 500 ribu Ha, namun seiring perkembangan situasi mengalami fluktuasi antara 300 sampai dengan 400 ribu Ha. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Kodim dalam CSR secara garis besar sama dengan yang dilaksanakan dalam pendampingan Oplah. Jika dilaksanakan oleh Kodim maka Kodim sebagai tim pelaksana swakelola, jika dilakukan oleh swasta maka Kodim bertugas mengawasi dan melaporkan untuk meyakinkan pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berdasarkan ketiga kegiatan di atas dilaksanakan secara simultan bertingkat bertahap dan berlanjut dengan pendampingan dari TNI AD yang melibatkan seluruh Satkowil jajaran TNI AD sampai dengan tingkat Babinsa. Dengan harapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, jika terjadi dinamika kendala di lapangan baik secara teknis maupun non teknis yang akan menghambat pencapaian target Swasembada Pangan Nasional, diharapkan Satkowil TNI AD sebagai mitra strategis Kementerian RI dan unsur pemerintahan sampai dengan tingkat daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dapat membantu mencari solusi bersama. Dalam strategi di atas yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya Kecamatan Lembang adalah Luas Tambah Tanam (LTT) Padi dan Oplah Non Rawa sebagai bentuk intensifikasi lahan. Hal ini terkait ketersediaan lahan pertanian khususnya padi di Kecamatan Lembang relatif terbatas dihadapkan maraknya potensi alih fungsi lahan pertanian padi menjadi kawasan wisata atau lahan pertanian komoditas lain.

Keterlibatan TNI AD dalam hal pendampingan tersebut secara integral dan komprehensif dari tingkat pusat (Mabesad/Sterad) sampai dengan Tingkat daerah (Satkowil/Kodam beserta jajarannya). Kodim 0609/Cimahi merupakan bagian dari satuan Komando Kewilayahan TNI

AD di bawah jajaran Korem 062/TN dan Kodam III/Siliwangi yang memiliki wilayah teritorial binaan salah satunya yaitu Kabupaten Bandung Barat termasuk Kecamatan Lembang di dalamnya. Dalam konteks kegiatan pendampingan pencapaian Swasembada Pangan tahun 2025, Kodim 0609/Cimahi melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat sebagai wujud Kolaborasi. Dari sini dapat terlihat adanya kolaborasi dari tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dimana kolaborasi adalah salah satu metode atau instrumen utama untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance (khususnya partisipasi dan orientasi konsensus) dalam praktik manajemen pemerintahan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang turut mengambil bagian dalam terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui sektor pertanian khususnya komoditi padi, walaupun buka sebagai wilayah sentra beras namun dengan kondisi geografi dan demografi yang ada sangat potensial untuk mendukung ketersediaan pangan wilayah melalui komoditas padi didukung oleh komoditas lain seperti perkebunan maupun hortikultura. Sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Lembang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, didukung hortikultura dan agrowisata. Tantangan yang dihadapi saat ini terutama bagaimana tetap mempertahankan lahan pertanian khususnya sawah padi di tengah ramainya sektor pariwisata di kecamatan Lembang. Jika tidak didukung manajemen wilayah yang baik oleh Pemda dapat berpotensi berkurangnya lahan sawah padi sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan wisata. Sebaliknya jika dilakukan manajemen yang baik dengan membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, justru bisa dikombinasikan antara pertanian dengan sektor wisata. Dengan demikian pendekatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi wisata tetap berjalan namun tidak mengurangi kemampuan wilayah dalam menjaga ketersediaan pangan.

Pemberdayaan Masyarakat

Swasembada pangan merupakan tanggung jawab pemerintah, dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.:

1. Mendukung Petani Lokal. Mendukung petani lokal dapat dilakukan dengan membeli produk pertanian langsung dari petani, berpartisipasi dalam pasar petani, atau bergabung dengan komunitas pertanian. Dengan mendukung petani lokal, kita dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendorong produksi pangan lokal. Dalam hal ini secara nyata dalam hal komoditi padi, bagaimana Pemda dapat mengintervensi alur distribusi padi dari mulai hulu (olah tanah dan olah tanam sampai dengan panen) sampai dengan hilir (akses masyarakat mendapatkan beras lokal dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik). Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari berbagai pihak salah satunya adalah TNI AD (Kodim) tentunya pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat target.
2. Meningkatkan Kesadaran tentang Ketahanan Pangan. Meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan dapat dilakukan dengan mengarahkan kelompok-kelompok tani untuk paling tidak terlibat dalam hal membaca artikel, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan stakeholder terkait. Dengan meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan, kita dapat lebih memahami pentingnya swasembada pangan dan berkontribusi dalam mewujudkannya. Dalam hal komoditi padi, pemberdayaan kelompok tani dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga profesi menjadi petani adalah salah satu profesi yang menjadi idaman karena dapat dijadikan sebagai mata pencaharian yang menentukan. Dengan demikian sedikit demi sedikit kesan bahwa profesi sebagai petani itu kotor, miskin, berpenghasilan pas-pasan, terbelakang dan tidak menjanjikan untuk pengidupan jangka panjang secara perlahan dapat terkikis (Subari, 2025).

Pembahasan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional di tengah dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, serta pertumbuhan penduduk yang pesat (Perdana et al., 2025). Dalam konteks ini, swasembada pangan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kemampuan memproduksi pangan dalam jumlah besar, melainkan sebagai kemampuan negara untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan pangan secara mandiri dan berdaulat. Dengan demikian, swasembada pangan merupakan refleksi dari kemandirian nasional sekaligus indikator penting dari ketahanan dan kedaulatan negara.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama Asta Cita Kabinet Merah Putih 2024–2029. Kebijakan ini dilandasi oleh pandangan konstitusional bahwa negara wajib hadir dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan, sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul (Gracino et al., 2021). Dalam berbagai pidato kenegaraan, Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kedaulatan negara, sehingga tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau bergantung pada impor.

Langkah-langkah strategis pemerintah pusat seperti peningkatan produksi padi dan jagung, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, penyesuaian harga pembelian gabah, serta penguatan peran BULOG menunjukkan bahwa swasembada pangan diperlakukan sebagai agenda lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan alokasi anggaran yang sangat signifikan dalam RAPBN 2026, termasuk subsidi pupuk, cadangan pangan nasional, dan penguatan kelembagaan logistik negara. Namun demikian, kebijakan berskala nasional tersebut tidak akan efektif tanpa manajemen kolaborasi yang kuat di tingkat daerah,

sebagai arena utama implementasi kebijakan public (Yusri et al., 2024).

Menurut Dwiyanto (2005), manajemen pemerintahan daerah tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan administratif yang prosedural dan hierarkis semata. Pemerintahan daerah dituntut untuk mengembangkan manajemen publik yang berorientasi pada hasil (result-oriented governance), partisipatif, transparan, dan kolaboratif. Dalam konteks swasembada pangan daerah, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena sektor pertanian melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda-beda.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, memiliki peran strategis sebagai:

1. Regulator, melalui pembentukan peraturan daerah dan kebijakan yang melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Koordinator, yang menyinergikan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
3. Fasilitator, yang membuka ruang kolaborasi antara dinas teknis, TNI AD, sektor swasta, dan masyarakat petani.

Dalam konteks Kecamatan Lembang, tantangan terbesar adalah tekanan alih fungsi lahan sawah akibat ekspansi sektor pariwisata dan komoditas non-pangan. Tanpa manajemen wilayah yang kolaboratif, potensi ini justru dapat melemahkan ketahanan pangan local (Mahendra et al., 2024). Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI AD merupakan bentuk konkret dari perluasan praktik good governance, khususnya prinsip partisipasi, orientasi konsensus, dan efektivitas kebijakan. Dalam perspektif keamanan nasional modern, krisis pangan dipandang sebagai ancaman non- militer yang berpotensi mengganggu stabilitas negara (Sudarwati & Nasution, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI, menjadi relevan secara normatif maupun strategis.

Melalui pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter), TNI AD khususnya melalui struktur komando kewilayahan hingga tingkat Babinsa berperan sebagai katalis dan pengawal implementasi kebijakan pertanian di lapangan. Keunggulan TNI AD terletak pada:

- Struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa;
- Disiplin dan kemampuan mobilisasi sumber daya;
- Kedekatan sosial Babinsa dengan masyarakat petani.

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, Kodim 0609/Cimahi menjadi simpul penting kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, dan kelompok tani. Kolaborasi ini tidak bersifat subordinatif, melainkan kemitraan fungsional, di mana TNI AD tidak mengambil alih kewenangan sipil, tetapi memperkuat kapasitas pelaksanaan kebijakan publik.

Kebutuhan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan pada tahun 2025 mendorong Kementerian Pertanian RI untuk mengakselerasi rencana strategisnya melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Program strategis seperti Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Optimasi Lahan (Oplah), dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) menjadi instrumen utama intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Dalam kerangka manajemen kolaborasi, pemerintah daerah berperan sebagai eksekutor kebijakan, sementara TNI AD berfungsi sebagai pendamping dan pengawal implementasi. Pendampingan Babinsa bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menciptakan sinergi antara pendekatan teknis dan sosial, sehingga:

- Tidak ada lahan sawah yang terlewat untuk ditanami;
- Hambatan teknis seperti irigasi, pupuk, dan alsintan dapat segera diidentifikasi dan dicari solusi;
- Data luas tanam dan produksi dapat dikonsolidasikan secara berjenjang dan akuntabel.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar pembagian tugas, tetapi proses integratif yang menyatukan sumber daya,

kewenangan, dan pengetahuan dari berbagai aktor.

Tabel 1. Struktur Kolaborasi Pertanian Padi di Lembang

Aktor	Peran	Bentuk Kegiatan	Frekuensi
Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan KBB	Fasilitator, Koordinator Regulator	Penyuluhan khusus padi (PTT), alokasi pupuk bersubsidi, forum koordinasi, & monitoring luas tanam	1x/bulan
KODIM 0609/Cimahi	Penggerak, Pelindung Lahan, & Pemersatu	Program TMMD (rehabilitasi jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani), pendampingan Babinsa untuk cegah alih fungsi lahan, pengawalan distribusi pupuk bersubsidi	Berkala (TMMD) & Rutin (Babinsa)
Aktor	Peran	Bentuk Kegiatan	Frekuensi
Kelompok Tani Padi	Pelaksana Utama	Budidaya padi, pengelolaan air, panen, pasca panen	Harian/Musim
PPL	Pendamping Khusus Padi	Teknis Bimbingan teknis PTT, monitoring hama penyakit, (intensif saat sekolah lapang)	2x/bulan (intensif saat musim tanam)
Swasta/Koperasi Offtaker	Mitra Input	Penyaluran pupuk/pestisida non- subsidi, pembelian gabah/beras	1-2x/bulan (intensif saat panen)
Pemerintah Desa	Penjaga Lahan	Kedaulatan larangan alih fungsi, fasilitasi pertemuan, data kepemilikan lahan	Sesuai kebutuhan

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KBB berperan sebagai leading sector di tingkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan swasembada pangan nasional. Secara manajerial, peran ini selaras dengan konsep manajemen pemerintahan daerah berbasis hasil (*result-oriented governance*) sebagaimana dikemukakan Dwiyanto (2005), di mana pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memfasilitasi aktor lain agar tujuan publik tercapai. Melalui kegiatan penyuluhan khusus padi berbasis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), alokasi pupuk bersubsidi, forum

koordinasi lintas aktor, serta monitoring luas tanam, Dinas Pertanian menjalankan fungsi regulatif sekaligus katalisator. Frekuensi kegiatan yang dilakukan secara rutin (minimal satu kali per bulan) menunjukkan adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi berkelanjutan, yang penting dalam menjaga konsistensi program pangan.

Tidak hanya itu, Keterlibatan KODIM 0609/Cimahi mencerminkan implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di sektor ketahanan pangan. TNI AD, melalui struktur komando teritorial (Kodim–Koramil–Babinsa), berfungsi sebagai aktor penggerak sosial dan penjaga stabilitas wilayah, terutama dalam konteks perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pembangunan jalan usaha tani memiliki dampak langsung terhadap efisiensi produksi dan distribusi hasil panen. Selain itu, pendampingan Babinsa dalam pengawalan pupuk bersubsidi dan pengawasan lahan sawah memperkuat aspek keamanan pangan sebagai bagian dari keamanan nasional.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kelompok tani merupakan actor inti dalam ekosistem kolaborasi ini karena mereka yang secara langsung melaksanakan budidaya padi, mulai dari pengolahan lahan, pengelolaan air, hingga panen dan pasca panen. Aktivitas yang bersifat harian dan musiman menunjukkan bahwa kelompok tani adalah produsen nyata pangan bukan hanya sekadar penerima kebijakan (Afriyanti & Abdullah, 2025).

Pada kolom PPL berfungsi sebagai jembatan pengetahuan *knowledge broker* antara inovasi pertanian dan praktik lapangan. Melalui bimbingan teknis PPT, monitoring hama dan penyakit, serta sekolah lapang, PPL memastikan bahwa kebijakan dan teknologi diterapkan secara tepat oleh petani. Selain itu, sektor swasta dan koperasi berperan sebagai penyeimbang ekonomi dalam kolaborasi ini. Mereka menyediakan input non subsidi terkait pupuk dan pestisida serta bertindak sebagai *offtaker* yang menyerap gabah atau beras petani. Peran ini dinilai krusial dalam

menjaga kepastian pasar dan stabilitas harga ketika masa panen. Pemerintah desa juga memiliki peran strategis sebagai penjaga kedaulatan lahan pertanian melalui peraturan desa yang melarang alih fungsi lahan (Aziz, 2025). Selain itu, desa memfasilitasi pertemuan warga dan menyediakan data kepemilikan lahan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pertanian dimana peran ini sejalan dengan konsep *governance* berbasis wilayah *place based governance*.

Berdasarkan berita yang dimuat oleh Bisnis.com pada 22 Oktober 2025 menandai suatu momentum penting dalam Sejarah Kebijakan pangan di Indonesia yakni keberhasilan Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025 dan dinilai telah melampaui konsep swasembada pangan (Digital, 2025). Berita ini secara kuat ditopang oleh data kuantitatif resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan FAO. Luas panen padi Januari-November 2025 mencapai 10,86 juta hektare, meningkat 12,08%, dengan produksi 57,60 juta ton GKG atau setara 33,19 juta ton beras, naik sekitar 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Data ini menjadi dasar objektif yang menguatkan klaim keberhasilan swasembada. Berikut merupakan hasil sesudah diberlakukannya kolaborasi:

Tabel 2. Contoh Evaluasi Dampak Kolaborasi pada Komoditas Padi (Data Simulatif Berbasis Realitas Pertanian Lembang)

Indikator	Sebelum Kolaborasi	Sesudah Kolaborasi	Persentase Peningkatan
Produktivitas Padi (kuintal/ha)	52,3	57,8	+10,5%
Pendapatan Petani Padi (Rp/musim)	6.800.000	8.100.000	+19,1%
Jumlah Pertemuan Koordinasi	4/tahun	10/tahun	+150%
Luas Lahan Sawah yang Terjaga dari Alih Fungsi (ha)	895	925	+3,4%
Tingkat Kepuasan Petani (Skala 1-5)	2,8	3,7	+32,1%

Penjelasan dan Justifikasi Data Simulatif:

1. Produktivitas Padi (kuintal/ha):
 - a. Baseline : 52,3 kuintal/ha (berdasarkan rata-rata produktivitas padi di Jawa Barat tahun 2023 - BPS)

- b. Pasca Kolaborasi : 57,8 kuintal/ha (+10,5%)
- c. Justifikasi : Peningkatan realistik melalui perbaikan irigasi TMMD dan pendampingan teknis PPL-Babinsa.

Produktivitas padi mengalami peningkatan dari 52,3 kuintal/ha menjadi 57,8 kuintal/ha hal ini mengalami peningkatan sebesar 10,5% setelah kolaborasi dijalankan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sinergi antar actor mampu mendorong efisiensi budidaya padi melalui penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu, perbaikan jaringan irigasi tersier melalui program TMMD serta pendampingan intensif oleh PPL dan Babinsa.

2. Pendapatan Petani Padi (Rp/musim):

- a. Baseline: Rp 6.800.000 (berdasarkan data pola tanam dan harga gabah di Lembang)
- b. Pasca Kolaborasi: Rp 8.100.000 (+19,1%)
- c. Justifikasi: Kombinasi peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi

Pendapatan petani padi meningkat dari Rp 6.800.000 menjadi Rp 8.100.000/ musim tanam atau naik sebesar 19,1%. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh naiknya produktivitas, tetapi karena adanya perbaikan tata niaga dan kepastian pasar melalui keterlibatan koperasi dan sektor swasta sebagai offtaker.

3. Jumlah Pertemuan Koordinasi:

- a. Baseline: 4 kali/tahun (hanya musim tanam)
- b. Pasca Kolaborasi: 10 kali/tahun (rutin bulanan plus musim tanam)
- c. Justifikasi: Implementasi forum koordinasi terstruktur dengan KODIM

Jumlah pertemuan koordinasi meningkat signifikan dari 4 kali/tahun menjadi 10 kali/tahun. Indicator ini mencerminkan penguatan proses kolaboratif terkhusus dalam hal dialog tatap muka, pertukaran informasi, dan penyelesaian masalah lintas sektor. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa frekuensi dan kualitas dialog merupakan prasyarat

utama keberhasilan *collaborative governance*. Dalam konteks ini, meningkatnya intensitas pertemuan antara Dinas Pertanian, KODIM, PPL, pemerintah desa, dan kelompok tani memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kendala lapangan, seperti kekurangan pupuk, gangguan irigasi, atau serangan hama.

4. Luas Lahan Sawah yang Terjaga:

- a. Baseline: 895 ha (data luas baku sawah Lembang 2023)
- b. Pasca Kolaborasi: 925 ha (+30 ha melalui reclaiming lahan marginal)
- c. Justifikasi: Program TMMD reclaiming lahan dan pengawasan Babinsa

Luas lahan sawah yang berhasil dipertahankan dari alih fungsi meningkat menjadi 925 ha. Meskipun persentase peningkatan relative kecil, indicator ini dinilai penting dalam konteks Kecamatan Lembang yang memiliki tekanan tinggi terhadap alih fungsi lahan menjadi Kawasan wisata dan permukiman. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan KODIM 0609/Cimahi dalam menjaga kedaulatan lahan pertanian. Peran Babinsa dalam pengawasan wilayah serta keberadaan peraturan desa tentang larangan alih fungsi lahan memperkuat kapasitas control sosial di Tingkat lokal.

5. Tingkat Kepuasan Petani:

- a. Baseline: 2,8 (skala rendah - masalah irigasi dan pemasaran)
- b. Pasca Kolaborasi: 3,7 (skala memuaskan - perbaikan layanan)
- c. Justifikasi: Survei kepuasan dengan sample 50 petani padi

Tingkat kepuasan petani meningkat dari 2,8 menjadi 3,7. Indicator ini merefleksikan dimensi subjektif dari keberhasilan kolaborasi, yaitu persepsi petani terhadap kualitas layanan pemerintah, efektivitas pendampingan, dan kebermanfaatan program. Dalam kerangka *good governance*, kepuasan Masyarakat merupakan

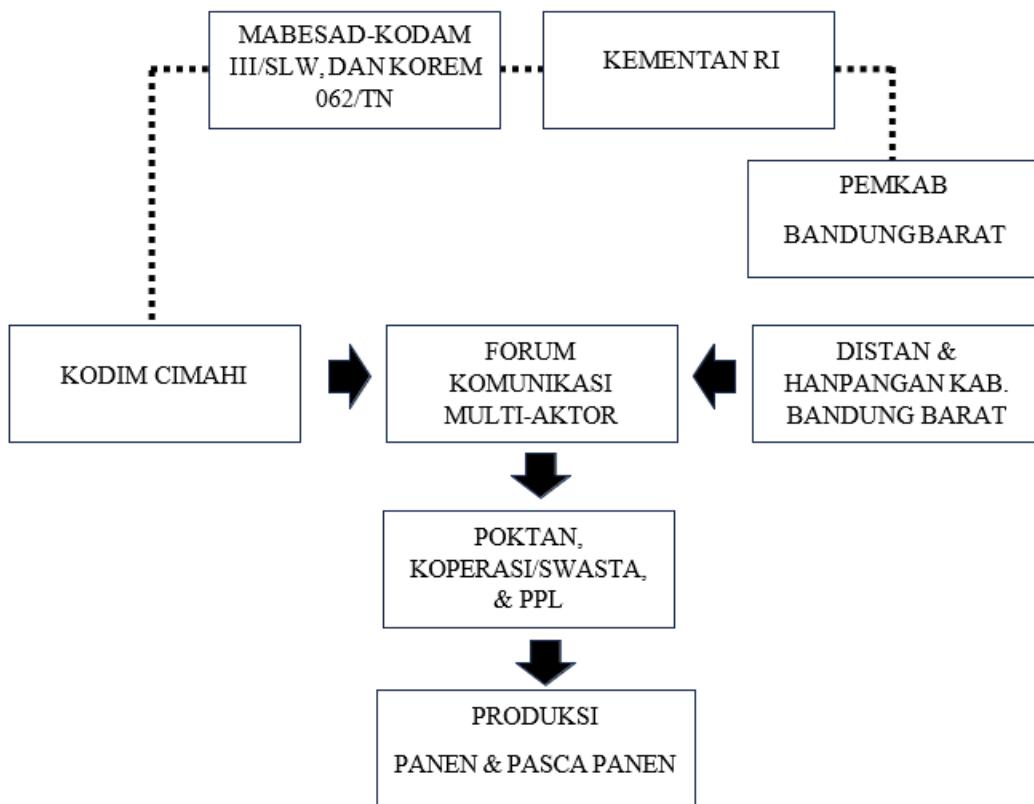
indicator penting keberhasilan pelayanan public (Dwiyanto, 2005). Peningkatan kepuasan petani menunjukkan bahwa mereka tidak lagi

diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses Pembangunan pertanian.

Tabel 3. Faktor Pendukung & Penghambat Kolaborasi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dukungan kebijakan Pemda (perlindungan lahan pertanian pangan)	Tekanan alih fungsi lahan untuk villa dan agrowisata
Kepercayaan antaraktor, terutama peran Babinsa dalam mengawasi lahan	Komunikasi lintas lembaga kurang optimal
Keterlibatan aktif PPL dan Babinsa dalam gerakan tanam serentak	Fluktuasi harga gabah yang merugikan petani
Rehabilitasi infrastruktur irigasi melalui TMMD	Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi
Sinergi dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Koordinasi teknis antara PPL dan Babinsa dalam hal pengairan dan hama

Diagram Alur Kolaborasi



Gambar 1. Diagram Alur

Peran Katalisator dan Protektor

KODIM Cimahi, melalui program TMMD, berperan sebagai katalisator dengan merehabilitasi jaringan irigasi tersier yang vital bagi

sawah. Lebih dari itu, melalui Babinsa, KODIM berperan sebagai *protektor* lahan dengan melakukan pendekatan preemtif dan preventif untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif, yang menjadi ancaman nyata di Lembang.

Pendampingan Teknis dan Sosial

Babinsa berperan sebagai ujung tombak kolaborasi yang menghubungkan aspek teknis (dari PPL) dengan aspek sosial kemasyarakatan. Kedekatannya dengan petani padi memudahkan sosialisasi gerakan tanam serentak dan membantu PPL dalam memantau kondisi sawah serta mendeteksi dini serangan hama.

Pemersatu dan Penjaga Stabilitas

Dalam konteks Lembang yang memiliki dinamika kepentingan tinggi antara pertanian padi, agrowisata, dan pembangunan properti, KODIM seringkali menjadi mediator yang netral dan dipercaya untuk mendamaikan potensi konflik lahan. Kehadiran mereka menciptakan rasa aman dan stabilitas yang kondusif bagi petani untuk terus berproduksi.

SIMPULAN

Penelitian ini memperluas pemaknaan swasembada pangan tidak hanya sebagai ketiadaan impor, tetapi sebagai kondisi sistemik yang mencakup peningkatan produksi, efisiensi pertanian, stabilitas harga, serta keberlanjutan sumber daya. Temuan penelitian menegaskan relevansi teori *result oriented governance* dan *collaborative governance* dalam kebijakan pangan nasional, dengan menunjukkan bahwa capaian swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi lintas aktor dan penguatan kelembagaan dari tingkat pusat hingga daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI AD, penyuluh pertanian, dan petani terbukti menjadi elemen integral dalam mendukung keberhasilan kebijakan pangan nasional. Oleh karena itu, pengembangan sumber pangan lokal secara

beragam, mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga untuk menyediakan pilihan pangan yang lebih beragam dan bergizi bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan publik, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga kebijakan swasembada pangan melalui pendekatan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan agar keberhasilan produksi tidak bersifat temporer, serta memperluas fokus kebijakan dari sekadar peningkatan produksi menuju stabilitas harga dan pemerataan distribusi pangan. Model kolaborasi lintas sektor perlu dipertahankan dan diperkuat, seiring dengan arah kebijakan pangan nasional yang semakin menekankan pertanian presisi dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran KODIM dalam forum kolaborasi pangan daerah, pengembangan skema pembiayaan kolaboratif antara TNI dan pemerintah daerah, pelatihan terpadu bagi penyuluh pertanian dan Babinsa, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil yang melibatkan seluruh aktor dengan indikator utama seperti produktivitas padi, luas baku sawah, dan tingkat pendapatan petani.

Daftar Pustaka

Afriyanti, A. N., & Abdullah, S. (2025). Collaborative Governance in Village Level in Indonesia. *ICAS*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2024.2358325>

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Anugerah, M. F. (2012). *Manajemen Pemerintahan daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru tahun 2012)*. 1–9.

Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*, 120–123.

Aziz, N. (2025). *STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENUJU SWASEMBADA*

PANGAN. 5(2), 671–688.

Baderi, F. (2025, August 27). Swasembada Pangan Wujud Nyata Asta Cita Presiden Prabowo. *Neraca.Co.Id.*

<https://www.neraca.co.id/article/224027/swasembada-pangan-wujud-nyata-asta-cita-presiden-prabowo>

Digital, M. (2025, October 22). Guru Besar Ekonomi Pertanian Sebut Indonesia “Beyond” Swasembada Pangan. *Ekonomi.Bisnis.Com.*
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20251022/99/1922591/guru-besar-ekonomi-pertanian-sebut-indonesia-beyond-swasembada-pangan>

Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Gracino, M. A., Priyanti, E., & Azijah, D. N. (2021). Collaborative Governance : Re-Enactment Share Understanding in the Process of Agricultural Food Management in Karawang Regency. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(1), 18–23.

Ibnu Redjo, S. (2018). Dinamika Manajemen Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 1–20. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.62>

Indriastuti, D., Priluddina, M., Rusmana, R. B., & Yuliyanto, T. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Program Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4613. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2960>

KBRprime. (2024, October 28). Mendagri Instruksikan Pemda Dukung Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo. *KBRprime.Id.*
<https://kbr.id/podcasts/kabar-baru/mendagri-instruksikan-pemda-dukung-target-swasembada-pangan-presiden-prabowo-52222>

Larsson, O. L., & Sjöqvist, S. (2022). Managing National Food Security in the Global North: Is Collaborative Governance a Possible Route Forward. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 13(2), 118–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/rhc3.12231>.

Mahendra, D. G., Fauzi, L. M., & Sukmapriyandhika, D. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DAN SATKOWIL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MIMIKA. *Jurnal Prinsip*, 1(1), 236–253.

Miles, & Hiberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode*. UI Press.

Mujiburrohman, M. A. (2021). *Civil Society-Militer dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Jawa Timur Civil Society-Military In Achieve Food Security In East Java*. 12(2).

Panggabean, A. L. (2025, January 21). Menko minta pemerintah daerah dukung penuh swasembada pangan. *AntaraneWS.Com*.
<https://www.antaraneWS.com/berita/4599570/menko-minta-pemerintah->

daerah-dukuNg-penuh-swasembada-pangan

Perdama, R. P., Septanti, K. S., Suryana, E. A., Ulpah, A., Agung, S. S., Suharyono, S., & Yuliani, F. (2025). Dinamika tingkat kemandirian pangan: implikasinya terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional The dynamics of food resilience: implications for national food security policy. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 23(1), 37–55.
<https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.37-55>

Pertanian, D. J. P. (2024, December 12). Kementerian Pertanian Perkuat Sinergi dengan TNI AD Wujudkan Swasembada Pangan. *Psp.Pertanian.Go.Id*.
<https://psp.pertanian.go.id/berita/kementerian-pertanian-perkuat-sinergi-dengan-tni-ad-wujudkan-swasembada-pangan>

Sandiasa, G. (2016). *Strengthens the Regional Position in the Era of Autonomy Dimensions of Administration Reform and Governance in Administration & Governance*.

http://gedesandiasa.com/media/file/PAPER_SARBAGITA_GEDE_SANDI ASA.pdf

Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9.

Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. CV Mandar Maju.

Singarimbun, M., & Effendi S. (1995). *Metode penelitian Survey*. LP3ES.

Smith, B. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*.

George Allen & Unwin.

Subari, W. A. (2025, March 25). Swasembada Pangan Adalah: Kemandirian dalam Ketahanan Pangan. *Mediaindonesia.Com*.
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/755354/swasembada-pangan-adalah->

kemandirian-dalam-ketahanan-pangan

Sudarwati, L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah dan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan*, 3(1), 1–8.
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847>

Sulistyowati, C. A., Afiff, S. A., Baiquni, M., & Siscawati, M. (2023). POTENSI PERTANIAN BERBASIS DUKUNGAN KOMUNITAS SEBAGAI SOLUSI PERSOALAN PETANI KECIL DI INDONESIA Community Supported Agriculture Potencies as a Solution for Small Farmers' Problems in Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 241–261.

Susanto, N. B., & Suharnoko, D. (2023). Interaction Supervisory Village Non Commissioned Officers (Babinsa) in Implementing the Universal Defense System to Face Digital Information Communication and Technology Challenges. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 04(01), 1–16.

Turnip, H. M. S. (2024). The Strategic Corporal: Relevansinya bagi TNI AD. *Jipolis: Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 1–10.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jipolis/article/view/3441>

U. Lele, M. K. M., & Goswami, S. (2013). Good Governance for Food, Water and Energy Security. *Aquatic Procedia*, 1, 44–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2013.07.005>.

Yusri, A., Fadli, M., Pane, R. P., Rafi, M., Wasillah, A., Notatema, B. H., & Alby, S. (2024). Collaborative Governance Strategy in Increasing Production and Strengthening Food Diversification in Rokan Hulu Regency , Riau Province , Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(3), 287–300.

Dokumen Lainnya

1. Perkasad No. 2 Tahun 2021 tentang Binter TNI AD.

2. Markas Besar TNI AD. (2020).
3. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa.
4. Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-231/RC.110/M/11/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Permohonan Dukungan Pencapaian Swasembada Pangan kepada TNI AD.
5. Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-231/RC.110/M/11/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Permohonan Dukungan Pencapaian Swasembada Pangan kepada TNI AD.